

## ALASAN PEMBENTUKAN

- **Badan Industri Mineral:**  
Lindungi & optimalkan mineral strategis lewat riset dan hilirisasi.
- **Badan Otorita Pantura:**  
Atasi rob & penurunan tanah, percepat pembangunan Giant Sea Wall.

## KEUNTUNGAN

- Lindungi SDA strategis & tingkatkan nilai tambah mineral.
- Jaga 20 juta warga pesisir Pantura dari bencana rob.
- Skema pendanaan kombinasi kurangi beban APBN.

## KEKURANGAN

- Tambah beban anggaran di tengah program efisiensi.
- Potensi tumpang tindih kewenangan dengan K/L lain.
- Skema pembiayaan Giant Sea Wall masih belum jelas dan berpotensi tarik-menarik kepentingan.

## POLEMIK

- **Kontradiktif**  
pembentukan badan baru terjadi saat Presiden mendorong efisiensi Rp306,6 triliun.
- **Efek ke daerah:**  
efisiensi APBN ikut memangkas transfer ke daerah (TKD), memicu kenaikan pajak lokal seperti kasus Pati (rencana PBB naik 250%).
- **Kritik publik**  
Publik mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi.

# PEMBENTUKAN DUA BADAN BARU DI TENGAH EFISIENSI

**P**residen RI, Prabowo Subianto, kembali membentuk dua badan baru setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Dua badan tersebut adalah Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa). Keduanya sejalan dengan sejumlah program serta proyek prioritas pemerintahannya. Seiring pembentukan badan baru ini, Presiden Prabowo melantik Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulianto sebagai Kepala Badan Industri Mineral, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Pembentukan dua badan tersebut menambah jumlah kementerian dan lembaga di bawah Presiden Prabowo yang kini mencapai lebih dari 50 institusi. Setiap kementerian teknis memiliki menteri dan wakil menteri, bahkan beberapa di antaranya—seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian BUMN—memiliki hingga tiga wakil menteri. Selain itu, sebelumnya juga dibentuk sejumlah lembaga baru, antara lain Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, serta Badan Penyelenggara Haji yang merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Agama. Menariknya, pembentukan dua badan baru ini dilakukan di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah. Program efisiensi tersebut pertama kali digulirkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025, Inpres perdana yang diterbitkan Presiden Prabowo sejak menjabat. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan pembentukan kedua badan tersebut dan bagaimana pengaturan anggarannya?

BACA HAL 11...



# PRESIDEN PRABOWO ANUGERAHKAN TANDA PENGHARGAAN PADA 141 TOKOH

**P**residen Prabowo Subianto menganugerahkan bintang tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Jumlah penerima penghargaan yang diberikan pada tahun ini tersebut lebih banyak hampir dua kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2024 lalu, yakni 64 penerima penghargaan.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, peningkatan jumlah penghargaan itu diputuskan Prabowo karena ia merasa negara masih kurang memberi penghormatan kepada individu yang berhak.

"Dari 141 penerima anugerah tahun ini, banyak di antaranya yang sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan dari negara," tuturnya pada Senin, sebagaimana dikutip dari Antara.

Prasetyo berujar, Prabowo menginginkan prosesi penyerahan penghargaan tanda jasa menjadi suatu tradisi yang dijaga. Sementara itu, penganugerahan tanda jasa pada tahun ini dilakukan kepada berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, seperti politisi, menteri, polisi, tokoh pers, hingga budayawan. Sebanyak 141 penerima penghargaan itu disebut telah melalui proses penilaian Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para tokoh penerima.

Para tokoh yang menerima penghargaan berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pejabat negara, aparat kepolisian, tokoh pers, hingga budayawan.

Sejumlah tokoh yang mendapatkan gelar tanda kehormatan di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, serta Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Prabowo memberikan enam jenis tanda penghargaan yaitu Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti.

Tanda penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama. Tanda penghargaan Bintang Republik Indonesia merupakan penghormatan tertinggi atas mereka yang dianggap luar biasa dalam menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI. (han,ist/lut)



## DAFTAR LENGKAP PENERIMA TANDA KEHORMATAN DARI PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO:

### Bintang Republik Indonesia Utama

1. Puan Maharani
2. Ahmad Muzani
3. Sultan Najamuddin
4. Sufmi Dasco Ahmad
5. Zulkifli Hasan
6. Wiranto
7. Agum Gumelar
8. Subagyo Hadi Siswoyo
9. AM Hendropriyono
10. Alm Moerdiono
11. Alm Jenderal Hoegeng Imam Santoso
12. Alm Rachmawati Soekarnoputri
13. Alm Abdul Rachman Ramly
14. Alm Aloysius Benedictus Mboi
15. Alm Muhammad Noer

### Bintang Mahaputera Adipurna

16. Abdul Muhaimin Iskandar
17. Bahlil Lahadalia
18. Saifullah Yusuf
19. Andi Amran Sulaiman
20. Marty Natalegawa
21. Retno Lestari Priansari Marsudi
22. Juwono Sudarsono
23. Noer Hassan Wirajuda
24. Alm Baharuddin Lopa
25. Alm Ida Cokorda Pemecutan
26. Alm Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
27. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
28. Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
29. Purnomo Yusgiantoro
30. Letjen TNI (Purn) Tarub

### Bintang Mahaputera Adipradana

31. Suhartoyo
32. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
33. Dino Pati Djalal
34. Alm Bismar Siregar
35. Alm Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
36. Alm Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasim
37. Alm Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono

38. Alm Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
39. Burhanuddin Abdullah
40. Terawan Agus Putranto

### Bintang Mahaputera Utama

41. Hashim Djojohadikusumo
42. Agus Harimurti Yudhoyono
43. Sugiono
44. Abdul Mu'ti
45. Fadli Zon
46. Andi Syamsuddin Arsyad
47. Suhardi
48. Siti Hardjanti Wismoyo
49. Prasetyo Hadi
50. Teddy Indra Wijaya
51. Meutya Hafid
52. Muhammad Yusuf Ateh
53. Ivan Yustiavandana
54. Dadan Hindayana
55. Perry Warjiyo
56. Miftachul Akhyar
57. Haedar Nashir
58. Sigit P. Santosa
59. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
60. Johannes Gluba Gebze
61. Herlina Christine Natalia Hakim
62. Francisco Xavier Lopez da Cruz
63. Almarhum Prof Fahmi Idris
64. Almarhum Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjamin
65. Almarhum Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
66. Mayjen TNI (Purn) Almarhum Mung Parh adimulyo
67. Almarhum K. H. Yusuf Hasyim
68. Almarhum K. H. Maimun Zubair
69. Almarhum K. H. Abdullah Abbas
70. Almarhum Letjen TNI (Purn) Rais Abin
71. Almarhum Jose Fernando Osorio Soares
72. Almarhum Abilio Jose Osorio Soares
73. Almarhum Arnaldo dos Reis Araujo
74. Almarhum AKBP (Purn) H. Soekitman
75. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
76. Yusuf AR
77. Maher Al Ga dri
78. Almarhum K. H. Muhammad Maksum
79. Juri Ardiantoro
80. Sudaryono
81. Angga Raka Prabowo

### Bintang Mahaputera Pratama

82. Anwar Iskandar
83. Alm. Soepriyatno
84. Angky Retno Yudianti
85. Widjono Hardjanto
86. Alm. H. Abidin
87. Abdul Ghofur
88. Soegeng Sarjadi
89. Simon Aloysius Mantiri
90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)
91. Abdul Rasyid
92. Nanik Sudaryati Daeyang

### Bintang Mahaputera Nararya

93. Willy Ananias Gara
94. Amzulian Rifai
95. Ismayatun
96. Lydia Silvanna Djaman
97. Teddy Sutadi Kardin
98. Taufiq Ismail
99. Muhammad Ainun Najib
100. Almarhum Cornel Simanjuntak
101. Alm. Asep Saifuddin Chalim
102. Almarhum Benyamin Sueb
103. Almarhum Titiek Puspa

### Bintang Jasa Utama

104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin
105. Carina Citra Dewi

### Bintang Jasa Nararya

106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
107. Sadiman
108. Seto Mulyadi
109. Senny Marbun
111. Almarhum Atmakusumah Astraatmadja
112. Andi Ramang
113. Diana Cristina

### Bintang Kemanusiaan

114. Abdul Muis
115. Aipda Muhammad Irvan

### Bintang Budaya Parama Dharma:

116. Sulaiman Mihardja
117. Slamet Rahardjo Djarot T
118. Waldjinah
119. I Nyoman Nuarta
120. Almarhum Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi
121. Alm Mochtar Lubis
122. Sukmono Hadi
123. Alm Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)

### Bintang Sakti

124. Francisco Deodato Osorio Soares
125. Vidal Domingos Doutel Sarmento
126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic
127. Joao Angelo de Sousa Mota
129. Alm Willie Firdaus
128. Alm Lettu (Purn) Isa Mangun
130. Alm Martinho Fernandes
131. Alm Joaquim Monteiro
132. Alm Alfonso Henrique Pinto
133. Alm Juliao Fraga
134. Alm Claudio Vieira
135. Alm Jose Fernandes
136. Alm Roberto Li
137. Alm Jose Da Conceicao
138. Alm Edmundo da Silva
139. Joao da Silva Tavares
140. Alm Hein Mantundoy
141. Aries Marsudiyanto.



# KOMISI VIII SEPAKAT RUU HAJI DAN UMROH DISAHKAN HARI INI

Seluruh fraksi di Komisi VIII DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025).

**K**eputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Perwakilan dari Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri-PAN RB, Menteri Sekretaris Negara, serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan keputusan tingkat I telah diambil secara bulat. "Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat I. Catatan dari pandangan fraksi-fraksi maupun pemerintah tidak ada. Bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya," ujar Marwan.

Marwan menambahkan, meski dalam pembahasan sempat terjadi perdebatan, seluruh isu krusial dapat diselesaikan. "Pada akhirnya, fraksi-fraksi tidak lagi memiliki catatan, sehingga RUU ini siap dibawa ke paripurna," kata Politisi Fraksi PKB ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji dan Umrah, Singgih Januratmoko, menjelaskan beberapa poin penting yang menjadi bahan perdebatan panjang sebelum disepakati.

Pertama, pengaturan mengenai tugas penyelenggaraan haji di daerah yang sebelumnya tidak diatur, kini dipertegas dalam dua level pengaturan. Kedua, penegasan kelembagaan yang kini berada di bawah kementerian, bukan badan tersendiri. Ketiga, mengenai kuota haji khusus yang diputuskan tetap sebesar 8 persen tanpa adanya kelas minimal maupun maksimal.

Selain itu, Panja bersama pemerintah juga menyepakati bahwa setiap tambahan kuota haji akan

diputuskan melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

Marwan menegaskan, Komisi VIII berharap RUU ini dapat segera disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI terdakat agar dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan haji di musim selanjutnya.

"Kita berharap kecacauan penempatan jemaah (haji) di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi. Dengan undang-undang ini, penyelenggaraan haji bisa ditata lebih baik, sesuai dengan dinamika di Arab Saudi dan peningkatan layanan dari Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan rencana inovasi untuk mengurangi durasi perjalanan haji dari 41 hari menjadi 30 hari, demi menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas layanan jemaah. "Jika Presiden berkenan dan ada kesepakatan dengan pihak Arab Saudi, termasuk pemanfaatan bandara di To'if, hal ini bisa dilaksanakan," katanya.

Sementara itu, terkait kuota tambahan, Komisi VIII menekankan agar tidak merugikan jemaah reguler yang telah lama menunggu antrean. "Tambahan kuota haji bisa saja 10 ribu, 20 ribu, atau 30 ribu, namun hal itu

harus dibahas bersama karena berimplikasi pada kemampuan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," jelas Marwan.

Sebagai catatan, pada musim haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 241.000 jemaah, terdiri atas 221.000 kuota haji reguler dan 20.000 kuota haji khusus. Dengan RUU baru ini, DPR RI berharap tata kelola kuota, pembiayaan, serta pelayanan jemaah haji dapat lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

Ketua Panja RUU PIHU, Singgih Januratmoko, menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga poin krusial yang berhasil disepakati. Pertama, terkait pengaturan tugas haji di daerah yang kini dibatasi dan diperjelas. Kedua, mengenai kelembagaan, di mana sebelumnya berbentuk Badan Haji, kini ditetapkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ketiga, soal kuota haji khusus yang tetap dipertahankan pada angka 8 persen.

Selain itu, Panja juga menyepakati bahwa kuota tambahan akan dibicarakan bersama antara DPR dan Kementerian yang baru. "Dengan demikian kami berharap Komisi VIII bisa menggunakan undang-undang ini sebagai landasan penyelenggaraan haji tahun 2026. Karena itu, kalau bisa segera diputuskan di paripurna terdakat," tambah Legislator Fraksi PKB Dapil Sumut II.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, revisi UU Haji ini mendesak agar kebijakan dapat menyesuaikan dengan perkembangan di Arab Saudi serta meningkatkan pelayanan kepada jemaah Indonesia. "Undang-undang ini sudah kita atur

sedemikian rupa sehingga nanti penataan jemaah bisa lebih baik. Kita berharap kekacauan penempatan jemaah seperti tahun sebelumnya tidak terulang lagi," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menjelaskan kementerian baru ini akan melengkapi pengelolaan haji dan umrah secara terpadu, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga jaminan keselamatan jemaah. Di samping itu, institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 di era Presiden Prabowo ini nantinya akan memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji.

"Sehingga, haji tidak hanya sekedar rutinitas formal, tapi harus memberi sumbangan bagi pembentukan karakter bangsa," ujar Maman saat ditemui Parlemenaria di sela-sela Rapat RUU Haji dan Umroh di Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Dalam rancangan undang-undang tersebut, DPR juga menekankan aspek kesehatan jemaah. Kementerian Haji dan Umroh diwajibkan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar calon jemaah benar-benar dinyatakan sehat sebelum berangkat. Hal ini sekaligus menjawab kritik dari Pemerintah Arab Saudi terkait banyaknya jemaah asal Indonesia yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji.

Legislator dari Fraksi PKB ini pun menegaskan, kementerian baru ini juga akan mengatur pelaksanaan umrah secara lebih ketat, sehingga travel penyelenggara haji tetap dapat memberangkatkan jemaah. "Namun, seluruh keberangkatan harus terkonfirmasi dalam sistem Kementerian Haji dan Umrah agar tidak ada lagi kasus jemaah yang terlantar atau ditipu," tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX ini menyebutkan proses pembahasan revisi UU Haji saat ini sudah berada di Panitia Kerja (Panja) dan dijadwalkan segera dibawa ke Komisi VIII untuk kemudian masuk ke pembicaraan tingkat pertama. DPR menargetkan percepatan pengesahan undang-undang agar bisa segera diikuti dengan penerbitan peraturan pemerintah. (han,rls/lut)



Kita berharap kekacauan penempatan jemaah (haji) di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi. Dengan undang-undang ini, penyelenggaraan haji bisa ditata lebih baik, sesuai dengan dinamika di Arab Saudi dan peningkatan layanan dari Indonesia,"

**MARWAN  
DASOPANG**

Ketua Komisi VIII DPR RI



Suasana pengucapan sumpah/janji dan pelantikan pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025) pagi WIB. (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

# USAI 2 TAHUN KOSONG, RI RESMI MILIKI DUBES DI AS LAGI

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025) pagi WIB. Salah satunya untuk negara Amerika Serikat (AS) yang sempat kosong 2 tahun.

**P**elantikan para dubes berdasarkan Keppres Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

Salah satu yang dilantik Presiden Prabowo adalah duta besar LBBP RI untuk Amerika Serikat (AS). Posisi ini sebelumnya mendapat sorotan besar setelah kosong selama dua tahun, menyusul Rosan Roeslani yang menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Posisi tersebut kini akhirnya terisi dengan Dwisuryo Indroyono Soesilo yang dilantik sebagai duta besar LBBP RI untuk AS.

Sejumlah posisi duta besar Indonesia lain yang sebelumnya kosong kini juga telah terisi, termasuk dubes RI untuk Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun Abdul Kadir Jailani dilantik sebagai duta besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman. Sementara Umar Hadi, sebagai duta besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA).

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Indroyono Soesilo menjadi duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS).

Hasan mengatakan penunjukan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu didasari oleh kemampuannya yang mumpuni dalam aspek diplomasi dan kerja sama internasional.

Hasan mengatakan penunjukan Indroyono sebagai Dubes RI untuk AS bukan hanya untuk kepentingan spesifik tertentu. Menurut Hasan, langkah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan AS secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dengan AS.

"Tentu kepentingannya adalah untuk jangka panjang. Hubungan baik,

diplomasi, hubungan kerjasama, hubungan ekonomi kita dengan Amerika Serikat dalam jangka panjang," kata Hasan dalam konferensi pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada Selasa (8/7/2025).

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara ihwal ketiadaan duta besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia mengkritik posisi dubes di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat, yang masih belum dijabat sampai saat ini.

Jusuf Kalla bercerita bahwa ketika masih menjabat sebagai wakil presiden, dia membuat aturan bahwa posisi duta besar hanya boleh kosong paling lama tiga bulan.

"Dubes baru bisa pulang kalau sudah ada penggantinya. Jadi, hanya boleh kosong selama tiga bulan. Tidak boleh lebih," kata pria yang akrab disapa JK itu saat ditemui dalam seminar perdamaian di kantor Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI),

Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025 lalu.

"Pengganti harus sudah siap. Kalau belum ada pengganti, jangan pulang dubes yang lama." Saat ditanya dengan kondisi pemilihan dubes di era Presiden Prabowo Subianto, JK irit berkomentar. "Kalau sekarang, enggak tahu lah," ujarnya sambil tertawa.

### Ikuti Jejak Ayahnya

Terpilihnya Indroyono menjadi Dubes AS, seolah mengulang kisah ayahnya, Soesilo Soedarman yang menduduki posisi serupa pada tahun 1986-1988, di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Di luar jabatan Dubes RI untuk AS, Soesilo yang meninggal dunia dalam usia 69 tahun pada 18 Desember 1996, pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

Indroyono yang lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955 bukanlah orang baru di pemerintahan.

Alumnus Teknik Geologi ITB yang

dikenal sebagai pakar penginderaan jarak jauh itu pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (2014-2015).

Selain itu, Indroyono yang menempuh pendidikan S2 dan S3 di Michigan University dan Iowa University juga pernah menjabat Staf Ahli Lemhannas Bidang Sumber Daya Alam (2015-2021), Staf Ahli Badan Nasional Pe-nanggulangan Bencana/BNPB (2016-2019), Penelaah Komite Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP (2018-sekarang), Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2020-sekarang).

Indroyono telah empat kali menerima Tanda Kehormatan dari pemerintah. Yakni Bintang Mahaputra Pratama (2009), Bintang Jasa Utama (1999), Satyalencana Karya Satya X (1999), dan Satyalencana Pembangunan (1995). (wid,rls,ant/dya)

## Daftar Duta Besar RI yang Dilantik Senin, 25/8/2025

1. Dubes RI untuk Meksiko merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala (Mexico City): **Toferry Primanda Soetikno**
2. Dubes RI untuk Amerika Serikat (Washington DC): **Dwisuryo Indroyono Soesilo**
3. Dubes RI untuk Brasil (Brasilia): **Andhika Chrisnayudhanto**
4. Dubes RI untuk Jerman (Berlin): **Abdul Kadir Jailani**
5. Dubes RI untuk Uni Emirat Arab (Abu Dhabi): **Judha Nugraha**
6. Dubes RI untuk Republik Ekuador (Quito): **Imam As'ari**
7. Wakil Tetap RI untuk PBB di New York: **Umar Hadi**
8. Wakil Tetap RI untuk PBB di Swiss (Jenewa): **Sidharto Reza Suryodipuro**

## Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Prabowo Cuma Lantik 8 Dubes

**MENTERI** Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto hanya melantik delapan duta besar RI dari total 24 calon dubes.

Sugiono mengatakan pelantikan delapan dubes RI hari ini dikarenakan masing-masing negara tujuan telah bersedia untuk menyambut perwakilan RI.

Sementara negara-negara sahabat lain masih dalam proses persetujuan sehingga dubes-dubes RI lainnya belum bisa dilantik.

"Kita masih menunggu persetujuan dari negara masing-masing. Jadi ini begitu yang enam sudah selesai langsung kita lantik, karena kita masih agak harus mengejar trimester berikutnya nih, kan harus masuk lagi, jadi yang

kemarin begitu udah ada yang terima, istilahnya agreement dari negara tujuan, langsung kita lantik," kata Sugiono kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025).

"Jadi sisanya ya menunggu agreement dari tempat negaranya," lanjutnya.

Sugiono menyampaikan pelantikan dubes memiliki mekanisme yang bergantung pada negara tujuan. Pemerintah Indonesia seyogyanya menunggu ketersediaan waktu kepala negara maupun kepala pemerintahan negara sahabat yang dituju.

"Kembali lagi pada ketersediaan waktu kepala negaranya atau kepala pemerintahannya. Jadi ada yang beberapa minggu dapat, ada yang

berbulan-bulan belum dipindahkan, masih lama. Semoga kita cepat nih," ucap Sugiono. (wid,rls,ist/dya)



Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aria

**Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui ketimpangan pendapatan asli daerah (PAD) ke APBD di berbagai wilayah Indonesia berpotensi melebar karena kebijakan efisiensi anggaran transfer ke daerah. Kondisi akan lebih miris dan kontras bila di potret per wilayah, Jawa dan luar Pulau Jawa.**

**W**akil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan saat ini masih terjadi ketimpangan rasio kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) ke APBD di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai informasi, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun 24,8% dari Rp864,1 triliun pada tahun ini (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun pada tahun depan (RAPBN 2026).

Bima mengungkapkan, sejak 2015 hingga 2025, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional hanya berada di kisaran 20%–25%. Tak ada perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Kondisi itu akan terlihat kontras apabila dibagi per daerah.

Dikatakannya, daerah maju seperti DKI Jakarta memiliki rasio PAD yang telah menembus 80%.

"Di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, ini rasio PAD-nya jauh sekali di bawah Jakarta, yaitu di bawah 15%," ujar Bima dalam rapat bersama DPR, Senin (25/8/2025).

Perinciannya per wilayah, Jawa—Bali memiliki rasio rata-rata PAD sebesar 25% terhadap total pendapatan daerah; Sumatra 22%; Kalimantan 18%; Sulawesi 12%; Nusa Tenggara 8%; Maluku 6%; dan Papua 4%.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya pola kebijakan fiskal yang tidak seragam ke semua daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu menyusun formula berbasis potensi dan kapasitas fiskal daerah yang lebih asimetris.

Bima memaparkan ketimpangan PAD dipengaruhi faktor koordinasi kelembagaan, kualitas SDM, dan infrastruktur digital. Daerah yang memiliki tata kelola keuangan lebih matang dan sistem informasi terintegrasi umumnya mencatat

kinerja PAD yang lebih baik.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa secara nasional struktur PAD masih didominasi pajak daerah (72%), diikuti retribusi daerah (9%) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (7%).

Menurutnya, ada tiga penyebab utama ketimpangan horizontal antar daerah itu yaitu potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap optimal, aset daerah yang belum dimanfaatkan maksimal, serta lemahnya SDM dan infrastruktur digital.

"Dalam hal ini, Kemendagri

# TIMPANGNYA PAD JAWA DAN LUAR JAWA

melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami mendorong untuk melakukan pendataan ulang, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pajak, memberikan pelatihan berkala kepada petugas pemungutan, penguatan regulasi, kemudian sistem pemungutan pajak yang berbasis digital, dan juga sinergi antar lembaga," tutupnya.

## 6 Titik Kebocoran

Wamendagri Bima Arya juga mengungkapkan adanya kebocoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penyebab lemahnya kemandirian fiskal di banyak daerah. Ia menyebut setidaknya ada enam titik kebocoran PAD yang kerap terjadi.

Pertama, pemerintah daerah dinilai kurang peka dalam menggali potensi penerimaan sehingga diversifikasi pajak masih terbatas. Kedua, target pajak tidak terpenuhi karena kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang rendah.

Ketiga, kebocoran terjadi akibat minimnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Keempat, lemahnya pengawasan terhadap petugas pemungutan. Kelima, penerapan

digitalisasi yang belum maksimal.

"Dan yang keenam, ini juga fenomena yang umum, banyak kegiatan yang dilaksanakan tapi belum terdaftar, belum memiliki izin, dan belum tercatat. Sehingga PAD berpotensi bocor di situ," kata Bima.

Untuk menutup kebocoran itu, Kemendagri mendorong pendataan ulang potensi penerimaan daerah, peningkatan kesadaran wajib pajak, pelatihan petugas pemungut, penguatan regulasi, serta penerapan sistem perpajakan digital yang terintegrasi antar lembaga.

Bima menambahkan, berdasarkan data kapasitas fiskal tahun anggaran 2025, sebanyak 493 dari 546 daerah (90%) masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Dari jumlah tersebut, 26 daerah (5%) tergolong kuat dan 27 daerah (5%) sedang. (wid,rls,ant/dya)

## KONDISI FISKAL PEMDA DI INDONESIA

### DARI 37 PROVINSI:

- 11 provinsi (29%) dengan kapasitas fiskal kuat
- 12 provinsi (32%) sedang
- 15 provinsi (39%) lemah

### DARI 415 KABUPATEN:

- 4 kabupaten dengan kapasitas fiskal kuat
- 4 kabupaten sedang
- 407 kabupaten lemah

### DARI 93 KOTA:

- 11 kota dengan kapasitas fiskal kuat
- 12 kota sedang
- 70 kota lemah

Sumber:Rapat DPR-Wamendagri 25/8/2025

## DPR: Bara Api Itu dari Pemerintah Pusat

**ANGGOTA** Komisi II DPR menganggap fenomena naiknya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bermula dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Kebijakan itu di antaranya yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, dalam praktiknya, penerapan kebijakan pajak diberlakukan atas rekomendasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, misalnya dengan rekomendasi penggunaan single tarif atau multi tarif dalam tarif PBB.

"Ketika single tarif dilakukan yang besar menjadi rendah, yang rendah jadi besar, dampaknya (tarif naik) 400%, 300%, itu akan terjadi pak," kata Khozin saat rapat kerja

Komisi II DPR dengan Kemendagri, Senin (25/8/2025).

"Saya sampling ada 20 kepala daerah yang saya hubungi langsung baik itu gubernur, dan bupati atau walikota, dan mereka takut ketika mau usul skema multitarif ancumannya ngeri, DAU nya akan di freeze, DBH nya akan dibekukan," tegasnya.

Sayangnya, ketika kenaikan tarif PBB mendapat respons negatif dari masyarakat, Khozin mengaku heran Kemendagri malah melakukan evaluasi dan menegur pejabat daerahnya.

"Saya itu agak gelisah ketika fenomena Pati meledak, dan beberapa daerah lain, Kemendagri tampil dengan 'yasudah nanti kita evaluasi, nanti kita tegur', padahal yang menyalakan bara api pertama itu Kemendagri secara yuridis," tutur Khozin.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima

menekankan, kenaikan PBB-P2 di 104 daerah seharusnya sudah menjadi alarm bagi Kemendagri sebagai pengawas penyelenggaraan pmda untuk mendorong para kepala daerah berinovasi mencari sumber penerimaan daerah.

"Selama ini, salah satu kebijakan yang sering ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah melalui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Akhirnya, kebijakan tersebut seringkali menimbulkan resistensi sosial karena langsung membebani masyarakat," tegasnya.

Merespons itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Aria menegaskan bahwa hingga saat ini Kemendagri tidak terlalu teknis terlibat dalam persentase kenaikan penyelesaian PBB-P2 di daerah.(cnbc,rls/dya)

# KABUPATEN MALANG SIAGA KEKERINGAN

## Siapkan 20 Tandon Air Berkapasitas 1.200 Liter

**MALANG** - Kabupaten Malang resmi masuk status siaga kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kabupaten Malang menyiapkan 20 tandon air baru. Berkapasitas 1.200 liter, air itu akan digunakan dengan sistem pinjam pakai bagi warga di wilayah rawan.

"Walaupun sudah masuk musim kemarau, namun masih banyak turun hujan di beberapa wilayah. Sehingga status Kabupaten Malang belum tanggap, baru siaga kekeringan," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Ichwanul Muslimin, Senin (25/8/2025).

Sebagai bentuk mitigasi, BPBD menyiapkan tambahan 20 tandon air baru berkapasitas 1.200 liter. Tandon tersebut akan digunakan dengan sistem pinjam pakai di wilayah yang mengalami krisis air.

"Tandonnya nanti bukan untuk didistribusikan menjadi hak milik, tapi untuk cadangan. Manakala terjadi kekeringan, kami pinjam-pakaikan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menyediakan tandon," jelas Ichwanul.

Tandon baru ini, menurutnya, merupakan bantuan dari BPBD Jawa Timur, melengkapi 50 tandon yang sudah dimiliki Kabupaten Malang sebelumnya. "Tandon dan air dari kami. Masyarakat tinggal memanfaatkan. Setelah tidak terjadi kekeringan, kami tarik kembali," sambungnya.

Berdasarkan pemetaan, terdapat sejumlah kecamatan yang rawan kekeringan di Kabupaten Malang. Di antaranya, yakni Sumbermaning Wetan, Bantur, Donomulyo, dan Jabung.

Wilayah-wilayah ini, kata Ichwanul, tercatat pernah mengalami kekeringan pada musim kemarau sebelumnya.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Malang belum menerima laporan adanya kekeringan maupun permintaan tandon dari masyarakat. Hal ini disebabkan hujan yang masih terjadi di beberapa titik.

"Musimnya memang kemarau, tapi iklimnya masih basah karena ada pengaruh badai ataupun muson.

Seharusnya sudah berganti, namun tetap terjadi hujan," jelasnya.

Ichwanul menambahkan, berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau di wilayah Malang diperkirakan berlangsung hingga September 2025, sebelum kemudian beralih ke musim penghujan. Ia juga menyebut dinamika iklim global seperti El Nino dan La Nina dapat memengaruhi pola hujan di daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Zainuddin, menegaskan kondisi saat ini masuk dalam kategori kemarau basah. Fenomena ini ditandai musim kering yang masih diselingi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.



Pelaksana tugas (Plt) Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Ichwanul Muslimin. (dok. Ist)

Menurutnya, fenomena kemarau basah membawa dampak positif dan negatif. Di sektor pertanian, kondisi ini memberi peluang bagi petani untuk memperpanjang masa tanam padi maupun palawija sehingga hasil panen berpotensi meningkat. (Santi/Dya)

# MESKI TRANSFER DAERAH DIPANGKAS, WALI KOTA MALANG PASTIKAN INSENTIF RP50 JUTA/RT TEREALISASI 2026



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (Santi/Lentera)

**MALANG** - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan program insentif Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT) tetap direalisasikan pada tahun 2026. Ditegaskan, program itu tak terdampak rencana pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD).

"Program prioritas yang sudah menjadi janji politik saya tetap, jadi masih akan berjalan. Jadi nanti kami

tinggal melihat yang harus bergeser itu apa saja," ujar Wahyu, Senin (25/8/2025).

Ditambahkannya, payung hukum terkait program insentif Rp50 juta per RT juga tengah disiapkan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali). Dengan dasar regulasi tersebut, pemerintah daerah memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai rencana.

"Kan nanti ada Perwalinya, sudah kami susun mulai sekarang ini,"

katanya.

Meski begitu, Wahyu menekankan penyaluran insentif tersebut tidak akan serta-merta diberikan merata ke seluruh RT pada saat yang bersamaan. Menurutnya, masih ada pertimbangan terkait kebutuhan di masing-masing wilayah.

"Kalau diberikan ke RT-RT yang berada di kawasan eksklusif misalnya,

itu kan mereka menganggap masih belum terlalu perlu. Nah itu nanti yang akan kami pertimbangkan, kami lihat dulu," jelasnya.

Wahyu menegaskan, program insentif tetap dilaksanakan namun akan dipetakan berdasarkan zona prioritas. Hal ini berarti, ada kemungkinan beberapa wilayah yang dinilai kurang mendesak tidak langsung menerima pada tahun 2026, melainkan di tahun-tahun berikutnya.

"Bukan tidak mendapatkan, ya. Tetapi bisa saja tidak di tahun 2026 nanti. Mungkin bisa di tahun selanjutnya. Nanti kami petakan," kata Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan mekanisme pemberian insentif Rp50 juta per RT tidak selalu berbentuk uang tunai yang langsung diterima masyarakat. Program tersebut bisa juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang diusulkan oleh RT, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Program insentif Rp50 juta ini tidak melulu terkait dengan

pemberian yang istilahnya uang itu langsung ketemu Rp50 juta, bukan begitu. Tetapi memang berupa program, dan itu programnya usulan dari mereka tetapi dilaksanakannya oleh OPD-OPD tertentu," paparnya.

Wahyu menyebut, skema ini dipilih agar manfaat program dapat lebih dirasakan masyarakat. Sekaligus menyesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran akibat pengurangan dana transfer dari pusat.

"Kalau dalam Perwalinya itu berupa uang. Tetapi dalam pelaksanaannya itu nanti intinya akan sama-sama bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui, setidaknya terdapat lima program prioritas yang merupakan janji politik Wahyu Hidayat bersama Wakilnya, Ali Muthohirin. Empat di antaranya telah mulai direalisasikan sejak 2025 ini, yakni pemberian seragam sekolah gratis, penyelenggaraan 1.000 event setiap tahun, penyelesaian masalah dasar perkotaan seperti banjir dan kemacetan, serta pemberian 1.000 beasiswa pendidikan per tahun. (Santi/Dya)

# MENCEKAM! TRUMP KERAHKAN GARDA NASIONAL BERSENJATA KE WASHINGTON

Anggota Garda Nasional Amerika Serikat yang ditempatkan di ibu kota, Washington DC, mulai melakukan patroli dengan senjata laras panjang pada hari Minggu (24/8/2025).

**P**ernyataan resmi dari Satuan Tugas Gabungan yang menjalankan misi tersebut menyatakan bahwa sejak larut malam 24 Agustus 2025, pasukan Garda Nasional mulai menggunakan senjata yang dikeluarkan dari dinas mereka, dikutip dari CNN pada Senin (25/8/2025).

Pasukan hanya diizinkan menggunakan kekuatan 'sebagai upaya terakhir dan semata-mata sebagai respons terhadap ancaman kematian atau cedera tubuh serius yang akan terjadi'.

Garda Nasional AS adalah pasukan cadangan paruh waktu yang berada di bawah komando gubernur masing-masing negara bagian.

Namun pasukan ini juga dapat dipanggil oleh pemerintah federal untuk menanggapi keadaan darurat dalam negeri, misi tempur luar negeri serta upaya pemberantasan narkoba.

Dalam konteks Washington, DC yang bukan merupakan sebuah negara bagian melainkan distrik federal, presiden memiliki kewenangan mengambil alih pengelolaan kepolisian hingga 30 hari.

Dengan kewenangan ini, Presiden Donald Trump telah mengerahkan Garda Nasional sejak awal Agustus 2025.

Pengiriman Garda Nasional ke ibu kota ini merupakan bagian dari agenda anti-kejahatan Presiden Trump yang semakin diperketat selama beberapa minggu terakhir.

Meskipun data resmi menunjukkan penurunan jumlah kejahatan di Washington, Trump terus menggambarkan ibu kota sebagai wilayah yang dilanda gelombang kejahatan dan kekerasan.

Ia bahkan mengklaim, tanpa bukti yang mendukung, bahwa tidak ada kejahatan atau pembunuhan di DC setelah penempatan pasukan.

"Tidak ada kejahatan dan tidak ada pembunuhan di DC.," tegasnya, dikutip dari Al Jazeera.

Selain itu, arahan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada minggu lalu memberi izin bagi anggota Garda Nasional untuk membawa senjata api, termasuk pistol M17 dan senapan M4, sebuah perubahan signifikan dari panduan Pentagon sebelumnya yang hanya memperbolehkan persenjataan

jika kondisi benar-benar memerlukan.

Perubahan ini meningkatkan tingkat kesiagaan dan ketegangan di ibu kota.

Untuk memperkuat pasukan Garda Nasional di DC, lebih dari 1.900 anggota dari negara bagian seperti Virginia Barat, Carolina Selatan, Mississippi, Ohio, Louisiana, dan Tennessee yang sebagian besar dipimpin oleh gubernur Partai Republik, telah dikirim ke ibu kota.

Pasukan-pasukan ini mulai tiba minggu lalu dan telah memulai patroli di sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan populer The Wharf, di mana



Pemerintahan Trump dilaporkan memperluas tindakan kerasnya terhadap kejahatan dengan mengerahkan hingga 1.700 pasukan Garda Nasional di 19 negara bagian untuk mendukung tindakan keras imigrasi dan kejahatannya (Foto: AFP)

seorang reporter CNN menyaksikan dua anggota Garda Nasional berpatroli dengan senjata laras panjang pada Minggu malam.

Langkah keras Trump juga termasuk pengambilalihan kendali atas Departemen Kepolisian Metropolitan Washington DC sejak 12 Agustus 2025.

Analisis data pemerintah yang dilakukan CNN menunjukkan penurunan sedang pada jumlah kejahatan yang dilaporkan sejak

pengambilalihan ini, meskipun terjadi lonjakan signifikan dalam penangkapan imigran.

Namun, kehadiran Garda Nasional bersenjata di ibu kota tidak lepas dari kontroversi. Beberapa warga menyambutnya dengan protes, ketakutan, dan kebingungan.

Banyak yang mempertanyakan urgensi penambahan pasukan militer bersenjata di tengah situasi yang, menurut data, relatif membaik. (Al Jazeera, CNN, Reuters, ist/nei)

## Banjir Penolakan, Dituding Politisasi Militer



Agen FBI berpatroli di kawasan Logan Circle, beberapa minggu setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan Garda Nasional dan penegak hukum untuk berpatroli di ibu kota negara guna membantu pencegahan kejahatan, di Washington, DC, AS, Minggu (24/8/2025). (Foto: Reuters)

**SELAIN** itu, Donald Trump menghadapi penolakan dari gubernur Partai Demokrat atas rencananya untuk menempatkan pasukan Garda Nasional ke kota-kota lain, termasuk Baltimore di Maryland dan Chicago di Illinois. Langkah ini dinilai para gubernur sebagai upaya mempolitisasi militer dan menciptakan krisis yang tidak perlu.

Gubernur Illinois, JB Pritzker, secara tegas mengecam rencana Trump. "Tidak ada keadaan darurat yang membenarkan pengiriman Garda Nasional ke Illinois. Presiden AS berusaha menciptakan krisis," kata Pritzker dalam sebuah pernyataan resmi. Ia menekankan bahwa kehadiran pasukan federal

bersenjata di kota yang aman justru dapat menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang tidak perlu.

Washington DC, yang memiliki populasi lebih dari 700.000 jiwa, tetap menjadi fokus utama upaya keamanan Trump. Presiden mengklaim bahwa langkah-langkah tegas tersebut diperlukan untuk menanggulangi kejahatan. Namun, warga dan tokoh politik mempertanyakan

efektivitas pengerahan pasukan bersenjata ini dan menilai langkah tersebut berpotensi memicu ketegangan baru di ibu kota.

Pemimpin Minoritas DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, menegaskan, "Trump tidak memiliki wewenang untuk mengerahkan pasukan ke Chicago karena Pentagon masih dalam tahap perencanaan awal kemungkinan pengerahan." Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim membenarkan adanya rencana awal di Pentagon untuk mengantisipasi permintaan Trump, namun pejabat senior militer belum menerima pengarah resmi terkait langkah ini.

Jeffries menambahkan, "Setiap langkah untuk mengerahkan pasukan ke Chicago merupakan upaya Trump menciptakan krisis. Tingkat kejahatan, termasuk pembunuhan, telah menurun di Chicago tahun lalu." Ia menegaskan, "Tidak ada dasar atau wewenang bagi Donald Trump untuk mencoba mengerahkan pasukan federal ke kota tersebut."

Selain Chicago, Trump sebelumnya juga mengusulkan pengerahan pasukan ke Baltimore, Maryland, yang juga dikuasai oposisi Partai Demokrat. Data kepolisian setempat per Juli menunjukkan penurunan signifikan dalam kekerasan senjata dibandingkan tahun sebelumnya. Kota ini mencatat 84 kasus pembunuhan tahun ini, angka terendah dalam lebih dari 50 tahun menurut walikota setempat.

Trump menyatakan melalui akun Truth Social, "Jika Wes Moore membutuhkan bantuan... saya akan mengirimkan pasukan, seperti yang dilakukan di dekat Washington, D.C., untuk segera membereskan kejahatan." Pernyataan ini menegaskan niatnya untuk memperluas pengerahan Garda Nasional ke kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat. (Reuters, Truth Social, ist/nei)



# Power Nap, Rahasia Energi Kembali dalam 20 Menit

**R**asa kantuk kerap muncul pada waktu-waktu penting, misalnya ketika rapat, menghadapi ujian, atau saat mengemudi. Jika dibiarkan, kantuk tersebut biasanya justru semakin berat. Sebagai alternatif daripada mengonsumsi kopi, tidur singkat atau power nap dapat menjadi solusi untuk mengatasinya.

Tidur siang singkat atau power nap tidak hanya membuat tubuh kembali segar, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidur selama 10–30 menit pada siang hari dapat membantu meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, serta memperbaiki suasana hati.

## Apa itu power nap?

Power nap adalah istilah untuk tidur siang singkat dengan durasi sekitar 15–30 menit. Tidur siang ini dilakukan dengan tujuan menambah power atau energi sehingga tubuh kembali bugar dan rasa kantuk berkurang.

Meskipun ada beberapa faktor yang memengaruhi kebutuhan waktu tidur siang setiap orang, situs Sleep Advisor menyebutkan bahwa durasi tidur siang terbaik bagi orang dewasa adalah 20–30 menit. Tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat Anda terbangun dengan sakit kepala, perasaan bingung, pusing (inersia), dan bahkan rasa kantuk yang lebih parah.

## Lebih Waspada dan Produktif

Hanya dengan tidur singkat selama 10–20 menit, tubuh dapat kembali segar dan fokus. Tidur sebentar ini juga mampu membantu mengurangi rasa lelah sehingga produktivitas tetap terjaga.

Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa manfaat tidur singkat dapat bertahan hingga tiga jam. Dengan demikian, tidur singkat menjadi cara sederhana namun efektif untuk mengatasi rasa kantuk, terutama pada sore hari.

## Tingkatkan Daya Ingat dan Konsentrasi

Power nap berperan penting dalam membantu otak menyerap serta menyimpan informasi baru. Tidur singkat ini memberi kesempatan bagi otak untuk memproses apa yang baru saja dipelajari sehingga kinerja memori menjadi lebih optimal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tidur sebentar setelah belajar dapat membuat informasi lebih mudah diingat dibandingkan hanya beristirahat tanpa tidur. Dengan demikian, power nap tidak hanya menyegarkan tubuh, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat.

## Baik untuk Kesehatan Jantung

Tidur singkat di siang hari terbukti bermanfaat bagi kesehatan, salah satunya dengan menurunkan tekanan darah serta membantu mengurangi risiko penyakit jantung, asalkan durasinya tidak lebih dari 30 menit.

## Mengurangi Stres dan Memperbaiki Mood

Power nap membantu menyeimbangkan hormon stres, membuat tubuh lebih rileks, dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tidur singkat terbukti bermanfaat bagi penderita depresi ringan.

## Meningkatkan Performa Fisik

Bagi atlet maupun pekerja dengan aktivitas padat, power nap dapat

menjadi strategi sederhana untuk menjaga energi sekaligus memperkuat sistem imun. Tidur singkat ini membantu tubuh memulihkan stamina sehingga tetap bugar dalam menjalani rutinitas yang menuntut banyak tenaga.

Selain itu, power nap juga menjadi cara efektif untuk merawat tubuh dan pikiran di tengah kesibukan. Dengan tidur siang singkat, seseorang dapat merasa lebih segar, meningkatkan fokus, serta menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Perbedaan Power Nap dan Tidur Siang Durasi atau waktu adalah perbedaan yang paling terlihat di antara power nap dan tidur siang biasa.

Sleep Foundation menjelaskan bahwa power nap seharusnya tidak berlangsung lebih dari 30 menit. Sementara itu, tidur siang pada umumnya bisa mencapai 40–90 menit.

Selain itu, jenis tidur siang ini biasanya hanya membawa seseorang memasuki fase siklus tidur pertama hingga kedua. Pada tahap ini, Anda belum memasuki fase tidur nyenyak.

Jika tidur siang dilakukan lebih lama, Anda bisa mengalami tahapan tidur lengkap hingga fase rapid eye movement (REM).

Pada tahapan tidur yang kedua, otot menjadi lebih rileks dan fungsi tubuh melambat. Sementara itu, tahap REM akan membuat otot tubuh lumpuh sementara. Oleh karena itu, waktu yang Anda butuhkan untuk kembali “segar” setelah tidur singkat ini memang lebih singkat dibandingkan dengan tidur siang biasa.

## Cara Melakukan

Satu hal yang paling penting untuk diperhatikan saat melakukan power nap adalah mengatur waktunya. Oleh karena itu, pastikan untuk menyalakan

alarm saat akan melakukan tidur siang.

Selain menjaga durasi, berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kualitas tidur siang.

Untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Tidurlah di ruangan yang sejuk, sepi, dan gelap agar tubuh lebih rileks. Gunakan masker mata untuk membantu memblokir cahaya serta penyumbat telinga atau headset agar terhindar dari gangguan suara.

Hindari tidur setelah makan karena dapat mengganggu proses pencernaan dan membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Selain itu, matikan notifikasi pada perangkat elektronik agar tidak terbangun di tengah malam. Terakhir, posisikan tubuh senyaman mungkin sehingga tidur dapat berlangsung lebih pulas dan berkualitas.<sup>5</sup>

Jika Anda bertanya, kapan waktu terbaik untuk tidur siang? Termasuk power nap, tidur siang paling baik dilakukan dalam pada pukul 1 siang sampai 3 sore.

Tidur di atas jam 3 sore cenderung membuat tubuh Anda terbangun dalam kondisi lemas dan sulit tertidur kembali pada malam harinya.

Itu dia informasi mengenai power nap dan alasannya mengapa jenis tidur siang ini kerap dinilai sebagai salah satu cara terbaik menghilangkan rasa kantuk di siang hari-hari, alih-alih dengan minum kopi.

Apabila Anda masih merasa ngantuk setelah terbangun dari tidur siang, cobalah untuk berjalan-jalan atau mencuci muka. Jangan melanjutkan tidur siang jika Anda tidak benar-benar membutuhkannya. (nei,ist/dya)

# ARKEOLOG UNGKAP JEJAK KONFLIK BRUTAL PRANCIS KUNO



(Ilustrasi) Tim gabungan Arab Saudi dan Prancis saat melakukan penggalian. (Twitter/@MOCHeritage)

**S**ekitar 6.000 tahun lalu di wilayah timur laut Prancis, sekelompok masyarakat merayakan kemenangan dengan memotong lengan kiri musuh yang berhasil mereka kalahkan, lalu menguburkannya di dalam sebuah lubang.

Temuan arkeologi ini memberikan gambaran tentang masa ketika peperangan kerap terjadi di kawasan tersebut, bersamaan dengan serangan para penjajah yang datang dari wilayah sekitar Paris ke timur laut Prancis.

Dalam sebuah publikasi di jurnal Science Advances, peneliti meneliti

sisa-sisa 82 individu yang dimakamkan di sejumlah lubang di timur laut Prancis pada periode 4300 hingga 4150 SM. Sebagian jenazah ditemukan dalam kondisi ter mutilasi dengan lengan dan tangan kiri terpotong, sementara jenazah yang utuh dikuburkan di lubang terpisah.

"Bagian tubuh bagian bawah (dipatahkan) untuk mencegah korban melarikan diri, seluruh tubuh menunjukkan trauma akibat benda tumpul dan yang lebih parah lagi, pada beberapa kerangka terdapat beberapa tanda, lubang tusuk. (Hal ini) mungkin menunjukkan bahwa jasad tersebut diletakkan di sebuah bangunan untuk

dipamerkan di depan umum setelah disiksa dan dibunuh," kata Teresa Fernández-Crespo, ahli osteoarkeolog di Universitas Valladolid di Spanyol, dikutip dari Live Science.

Untuk menyelidiki apakah perlakuan penguburan mencerminkan asal-usul seseorang, para peneliti menganalisis tanda-tanda kimiawi pada gigi dan tulang, yang dapat memberikan petunjuk tentang tempat orang-orang tersebut tumbuh dan makanan yang mereka konsumsi.

Orang-orang yang dimutilasi

berasal dari luar daerah setempat, kemungkinan di sekitar Paris. Tanda-tanda kimiawi tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok orang ini mengkonsumsi makanan yang berasal dari berbagai daerah, yang menunjukkan bahwa mereka sering berpindah-pindah.

Analisis kimia yang ditunjukkan untuk mereka yang tidak terluka, kemungkinan merupakan penduduk setempat. Hal ini menunjukkan mereka tewas karena mempertahankan wilayah mereka.

Beberapa penjajah kemungkinan ditangkap oleh para pembela wilayah, lengan atau tangan kiri mereka dipotong sebagai "piala" dalam salah satu contoh perayaan kemenangan perang paling awal yang terdokumentasi dengan baik di Eropa prasejarah.

"Kami yakin mereka dianiaya dalam konteks ritual kemenangan atau perayaan kemenangan setelah satu atau beberapa pertempuran," ujar Fernández-Crespo.

"Karena lubang pemakaman terletak di tengah pemukiman, hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan sandiwara kekerasan yang bertujuan untuk merendahkan martabat musuh yang ditawan di hadapan seluruh masyarakat."

Detlef Gronenborn, seorang profesor arkeologi di Pusat Arkeologi Leibniz di Jerman, mengatakan bahwa periode sekitar 4500 hingga 4000 SM adalah masa kerusuhan yang cukup besar di Eropa dan berkaitan dengan periode volatilitas iklim yang tinggi, yang menemui puncaknya pada sekitar tahun 4100 SM. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**BIRO:** SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**MEDIA TERVERIFIKASI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Pakaian Warna Terang Cerminkan Jiwa Penuh Energi

**P**ilihan warna dalam berpakaian kerap merefleksikan karakter serta kondisi emosional seseorang. Individu yang menyukai busana berwarna terang biasanya dipandang sebagai pribadi yang ceria dan penuh percaya diri. Selain mampu menarik perhatian, warna-warna cerah juga dapat membentuk cara pandang orang lain terhadap penampilan pemakainya.

Dikutip dari Psychology Today, warna dengan tingkat kroma tinggi—atau intensitas warna yang kuat—dapat memberikan kesan ekstrovert dan terbuka pada pemakainya. Hal ini berarti, individu yang memilih pakaian berwarna terang mungkin dipersepsikan sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul.

Dikutip dari Aesthetics of Joy, mengenakan pakaian berwarna terang juga dapat meningkatkan energi dan suasana hati. Warna-warna terang memantulkan lebih banyak cahaya, memberikan efek visual yang menyegarkan dan membangkitkan semangat.

## Warna Terang dan Kesan Ekstrovert

Studi menunjukkan bahwa individu yang mengenakan pakaian berwarna terang sering kali dipersepsikan sebagai pribadi yang ekstrovert. Mereka dianggap lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Warna-warna dengan kroma tinggi, seperti merah, kuning, atau oranye, dapat meningkatkan persepsi ini.

Selain itu, dalam konteks profesional, mengenakan pakaian berwarna terang dapat memberikan kesan kompeten dan percaya

diri. Misalnya, dalam bidang penjualan atau layanan pelanggan, penampilan yang terang dan menarik dapat membantu membangun hubungan positif dengan klien.

## Pengaruh Warna Terang terhadap Suasana Hati

Mengenakan pakaian berwarna terang tidak hanya memengaruhi bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga dapat memengaruhi perasaan kita sendiri. Warna-warna terang, seperti kuning atau hijau, sering dikaitkan dengan perasaan bahagia dan energi positif. Dengan memilih pakaian berwarna terang, seseorang dapat meningkatkan suasana hati dan merasa lebih bersemangat sepanjang hari.

Selain itu, warna-warna terang dapat memberikan dorongan energi visual, mirip dengan efek kafein pada tubuh. Hal ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan fokus, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi.

## Warna Pakaian sebagai Bentuk Ekspresi Diri

Pilihan warna pakaian dapat menjadi sarana ekspresi diri yang kuat. Mereka yang memilih warna-warna terang mungkin ingin menampilkan sisi kepribadian yang bersemangat

dan optimis. Sebaliknya, warna-warna netral atau gelap mungkin dipilih untuk mencerminkan keseriusan atau profesionalisme.

Menariknya, preferensi warna dapat berubah sesuai dengan suasana hati atau fase kehidupan seseorang. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung memilih warna terang saat merasa bahagia atau ingin menarik perhatian, dan memilih warna lebih gelap saat ingin merasa tenang atau tidak menonjol.

## Warna Analog

Kombinasi warna analog merupakan perpaduan dari warna-warna yang saling bersebelahan dalam roda warna. Perpaduan ini menghasilkan kesan harmonis karena memiliki kemiripan dan kedekatan satu sama lain. Jika ingin mencoba menerapkan teknik ini, dapat dipilih paduan warna biru dengan ungu, merah dengan oranye, atau biru muda dengan biru tua. Tidak perlu khawatir tampilan menjadi tidak serasi, sebab warna analog cenderung tampak selaras dan saling melengkapi.

## Warna Kontras

Berbeda dengan analog, warna komplementer merupakan perpaduan warna-warna yang saling berseberangan pada roda warna. Penerapan warna ini memerlukan keberanian karena menghasilkan kontras yang cukup

Namun demikian, apabila kurang yakin memadukan warna kontras yang terang, dapat digunakan pilihan warna pastel yang kontras. Warna kontras dengan nuansa lebih lembut dapat menjadi solusi. Pakaian dengan kombinasi ini mampu menghadirkan kesan segar sekaligus energik.

## Warna Monokromatik

Banyak yang beranggapan bahwa warna monokrom hanya terbatas pada hitam, putih, dan abu-abu. Padahal, monokromatik adalah perpaduan beberapa variasi warna yang berasal dari satu warna dasar dengan intensitas berbeda. Misalnya, warna dasar oranye dapat bertransisi menjadi coral, lalu berubah menjadi peach seiring penurunan intensitasnya.

Penggunaan warna monokromatik merupakan cara paling mudah untuk menampilkan kesan segar, terutama dengan nuansa pastel. Gradasi dari satu warna dengan tone yang senada juga dapat menciptakan tampilan yang selaras dan elegan.

## Warna Triadik

Kombinasi warna triadik menghadirkan pilihan yang lebih beragam dibanding teknik sebelumnya. Paduan ini diperoleh dengan memilih tiga warna yang membentuk segitiga dalam roda warna. Teknik ini menghasilkan kombinasi yang unik dan kerap dijumpai dalam gaya busana era 1990-an.

Sebaiknya tentukan satu warna sebagai dominan, sementara dua warna lainnya digunakan sebagai aksent. Apabila kombinasi tampak terlalu mencolok, keseimbangan dapat dicapai dengan menambahkan unsur berwarna netral. Selain itu, pemilihan bahan, pola, dan potongan juga perlu diperhatikan. (nei,ist/dya)



**Pembentukan Dua (dari Hal 1) ...**

**D**ua badan itu adalah Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Dua badan yang baru dibentuk pada pemerintahannya itu sejalan dengan sejumlah program maupun proyek prioritasnya.

Badan Industri Mineral untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral strategis yang dimiliki Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025), menjelaskan bahwa badan ini dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yulianto.

"Hampir seluruh mineral strategis berada di negara kita ini. Karena itulah, untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam terutama mineral strategis ini, maka kita memutuskan ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan," kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan Brian sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara, Jakarta dilansir antara.

Ia mengatakan pembentukan badan baru ini merupakan jawaban atas kebutuhan bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi, sekaligus upaya melindungi kekayaan mineral nasional.

Sedangkan, penunjukan Brian sebagai nahkoda Badan ini didasarkan pada kapasitasnya di bidang riset dan inovasi. "Supaya pada saat nanti harus misalnya, dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini," ucapnya.

Prasetyo menegaskan bahwa Badan Industri Mineral akan berdiri sendiri, bukan di bawah Kementerian ESDM maupun Kemendiktisaintek.

Ke depannya, Badan ini punya tugas utama yaitu perlindungan mineral strategis, identifikasi sumber daya mineral nasional, serta penelitian untuk mengolahnya agar memberikan manfaat lebih optimal bagi negara.

Ia berharap, latar belakang akademis dan pengalaman riset yang kini dimiliki Mendiktisaintek dapat mempermudah kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian.

Sedangkan, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa untuk menangani kebutuhan mendesak, terutama pembangunan tanggul laut raksasa

atau Giant Sea Wall.

Prasetyo, mengatakan badan itu dikepalai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf. "Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Prasetyo, menjawab kebutuhan mendesak Badan Otorita Pantura.

Prasetyo mengatakan, data menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantai utara Jawa, sementara rob sudah hampir rutin terjadi di sejumlah wilayah. Padahal, sekitar 20 juta warga tinggal di pesisir Pantura.

Ia mengatakan, badan ini dibentuk Presiden untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa.

Struktur kepemimpinan badan terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala. Darwin Trisna Djajawinata selaku salah satu perwakilan Danantara dan Suhajar Diantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.

Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan tafsir politik. "Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa," katanya.

Prasetyo menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.

Laksana Madya TNI Purn Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, beserta dua wakilnya didasari atas surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, yang dibacakan hari ini.

Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa tugas utama badan yang dipimpinnya adalah melaksanakan pembangunan tanggul laut di pantai utara Jawa. "Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) tentunya melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul laut di pantura Jawa," kata Didit.

Didit mengatakan dirinya memiliki tugas untuk mencegah timbulnya persoalan yang berkaitan dengan ekosistem maupun

masyarakat pesisir dalam pembangunan tanggul laut tersebut. Dia menambahkan langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta sejumlah menteri terkait.

Terkait pendanaan, Didit menyatakan bahwa fokus pencarian investasi akan dilakukan setelah proses konsolidasi dengan pihak-pihak terkait rampung. "Insya Allah nanti setelah ini (mencari investasi), kita baru konsolidasi," kata dia.

Dalam kesempatan berbeda, AHY menyampaikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha. "Tentunya kombinasi, kerja sama pemerintah dan badan usaha adalah yang terbaik," katanya.

Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dinilai sebagai skema yang paling tepat. Adapun terkait proporsi pendanaan masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Dia menambahkan sebagai Menko Infrastruktur, dirinya akan menjadi Dewan Pengarah untuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) guna memastikan penanganan kawasan pesisir, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa.

Dalam peran sebagai dewan pengarah, AHY menyebut pihaknya akan memberikan masukan sekaligus bersinergi dengan badan otorita dalam langkah konkret pembangunan.

"Saya sebagai dewan pengarah tentunya akan memberikan masukan-masukan, sekaligus juga bisa join forces dengan Badan Otorita yang baru dalam menjalankan dan memulai langkah-langkah yang lebih konkret untuk pembangunan giant sea wall dan juga perlindungan terhadap pesisir Jawa secara keseluruhan," katanya.

Pembentukan dua badan ini dilakukan di tengah ingar bingar Presiden Prabowo menggalakkan efisiensi belanja pemerintah. Hal itu dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, Inpres pertama yang dikeluarkannya sebagai Kepala Negara.

Pada Inpres tersebut, lefisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 diatur sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri dari Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp50,59 triliun transfer ke daerah. Efisiensi itu sejalan dengan peluncuran program flagship pemerintahan Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Masuk semester II/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lalu

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beleid ini menjadi pedoman teknis untuk melanjutkan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, PMK No.56/2025 tidak menuliskan anggaran belanja lainnya dalam pos anggaran yang kena efisiensi. Itu artinya ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15 yang diefisiensi kalau membandingkannya dengan jumlah yang tertera dalam Surat Menkeu No: S-37/MK.02/2025.

Kalau merujuk beleid baru itu, item barang maupun jasa yang menjadi sasaran efisiensi anggaran antara lain, alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat, seminar, dan sejenisnya; kajian dan analisis; diklat dan bimtek; honor output kegiatan dan jasa profesi; percetakan dan souvenir; sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.

Selanjutnya, lisensi aplikasi; jasa konsultan; bantuan pemerintah; pemeliharaan dan perawatan; perjalanan dinas; peralatan dan mesin; infrastruktur.

Kepala Biro Layanan Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa 15 item belanja yang tercantum dalam PMK No.56/2025 merupakan item belanja yang termasuk dalam kategori belanja barang dan modal.

Sementara itu, item belanja lainnya yang tercantum dalam S-37 menjadi target identifikasi rencana efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sebagaimana diatur juga dalam ketentuan yang sama pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).

"Di mana dibuka ruang untuk pemenuhan target efisiensi dari jenis belanja lain sesuai dengan arahan Presiden," imbuh Deni dilansir Bisnis, Senin (25/8/2025).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga merespons singkat. Dia juga enggan menjelaskan lebih terperinci efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pelaksanaan pertama di awal tahun ini.

Namun demikian, Suahasil menjelaskan bahwa kementerian bakal mengumumkan lebih lanjut soal implementasi PMK tersebut. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menuturkan, efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga.

"Kalau efisiensi kan memang sudah menjadi keinginan kita setiap lembaga. Terus mencari efisiensi dalam anggaran. Jadi lanjut terus aja, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan," tuturnya di Istana Kepresidenan. (han,ant,ist/lut)

# DEMO DI DPR RICUH HINGGA KE TANAH ABANG

Aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025) memanas dan mengakibatkan keriuhan. Bahkan hingga Senin malam, keriuhan menyebar ke berbagai titik, bahkan hingga ke ke Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.



Polisi menembakkan gas air mata ke massa aksi di Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). (Tempo)

**D**ilansir dari Tempo, pada pukul 21.00 WIB, prajurit TNI-Polri dengan berseragam lengkap memukul mundur pengunjuk rasa di sekitar Jalan Pejompongan Raya dengan cara menembakkan gas air mata ke arah massa. Namun, demonstran yang didominasi oleh pemuda dan pelajar itu membalasnya. Mereka melempar balik dengan batu ke arah prajurit TNI-Polri.

Demonstran menuntut agar prajurit TNI-Polri tidak menghalangi jalannya untuk bisa berdemonstrasi di sekitar gedung DPR. "Katanya terbuka. Terbuka apanya. Yang baru bersuara, dibalas dengan tembakan gas air mata?" kata demonstran sambil berteriak ke arah prajurit TNI-Polri di lokasi.

Asap itu merupakan zat kimia iritan dari selongsong gas air mata yang dilontarkan aparat kepolisian untuk membubarkan massa aksi demonstrasi bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia".

Pada pukul 21.25 WIB, massa aksi yang terdiri dari pemuda dan pelajar berlarian menjauhi kepanan gas. Pemuda dan pelajar tersebut sebelumnya juga ditembak gas air mata kala menggelar demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Akibat tembakan tersebut, massa aksi yang sebelumnya membalas tembakan gas air mata aparat dengan lemparan batu, berhamburan sambil menahan rasa perih dan sesak. Di belakang mereka, personel brigade mobil kepolisian mengejar. "Pulang, kami beri kesempatan untuk pulang ke rumah masing-masing," teriak salah satu personel Brimob.

Beberapa kelompok pelajar dari berbagai sekolah terlihat bergerombol dan beristirahat di Jalan Penjernihan, Tanah Abang, dikutip dari laporan di laman VOI, Senin (25/8/2025). Sementara itu, kelompok lain tampak tiba dengan menyusuri rel kereta api. Mereka membawa bendera Merah Putih sembari meneriakkan yel-yel asal daerah masing-masing. "Tanjung Priok, Tanjung Priok, Tanjung Priok!" kata sekelompok pelajar.

Ruas Jalan Pejompongan hingga Penjernihan Raya lumpuh total akibat bentrokan antara massa dan aparat yang masih terjadi. "Ditutup, Bang. Masih ada ribut, bentrok sama aparat," kata seorang pemuda di Jalan Pejompongan.

Dampak bentrokan juga dirasakan sejumlah fasilitas umum dan usaha warga. SPBU Pejompongan menutup operasionalnya untuk menghindari massa yang brutal. Sejumlah pedagang di Jalan Penjernihan juga tampak memilih menutup tempat usahanya.

Demonstrasi atas inisiasi gerakan yang mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" tersebut mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo, hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Selain menuntut pengusutan dugaan korupsi keluarga Jokowi dan pemakzulan Gibran, pengirim pesan juga mengajak menyoro isu lain, seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara DPR dan masyarakat.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan instansinya menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam pengamanan demonstrasi di DPR hari ini.

Dia mengklaim pengamanan akan dilakukan secara humanis dan memprioritaskan pendekatan persuasif.

Demonstrasi ini dimulai sejak Senin (25/8/2025) pagi. Massa sempat berunjuk rasa di depan gedung DPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Tapi polisi yang berjaga mendesak demonstran untuk menjauh dari gedung DPR. Kemudian pengunjuk rasa beralih ke pintu belakang DPR, di Jalan Gerbang Pemuda. Di sini, polisi lantas membubarkan paksa demonstran. Pantauan di lapangan, polisi membubarkan paksa pengunjuk rasa dengan mengerahkan personel bertameng disertai tembakan gas air mata berulang kali pada pukul 18.00 WIB.

Demonstrasi di sekitar gedung DPR ini berlangsung ricuh. Sepanjang unjuk rasa, polisi berulang kali melontarkan gas air mata ke arah demonstran. Awalnya massa yang bertahan di Jalan Gerbang Pemuda dihujani tembakan gas air mata yang membuat mereka mundur hingga ke pertigaan Jalan Asia Afrika.

Namun, polisi terus mendorong massa hingga mundur ke arah Patal Senayan. Sementara itu, lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda masih ditutup imbas gas air mata yang masih mengepul.

Demonstrasi yang diinisiasi oleh gerakan yang mengatasnamakan

"Revolusi Rakyat Indonesia" ini menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka juga mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR, kenaikan pajak, dan polemik utang negara.

Mengutip siaran pers dalam Aliansi Rakyat Bergerak di akun Instagram (IG) @gejayamemanggil, aksi itu dinamai "Indonesia Gelap, Revolusi Dimulai".

## Ada beberapa poin yang dituntut, antara lain?

1. Turunkan Prabowo-Gibran
2. Bubarkan Kabinet Merah-Putih
3. Bubarkan DPR RI
4. Hentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia
5. Tangkap dan adili Fadli Zon atas penyangkalan terhadap tragedi pemerkosaan massal 1998
6. Tolak Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Anti-Pemerasan (RKHUAP)
7. Transparansi gaji anggota DPR
8. Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR
9. Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR

Kepala bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi, mengatakan pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi merupakan bagian dari standar operasional prosedur atau SOP. Ia menuturkan, pada setiap kegiatan pengamanan, Polda Metro Jaya tidak bekerja seorang diri, melainkan melibatkan stakeholder lainnya, termasuk prajurit dari Komando Daerah Militer Jakarta Raya.

"Pemeliharaan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilakukan secara bersinergi," kata Ade Ari di gerbang Pancasila DPR, Senin, 25 Agustus 2025

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan instansinya menerjunkan 1.250 personel gabungan dalam pengamanan demonstrasi di DPR hari ini. Ia mengklaim, pengamanan akan dilakukan secara humanis dan memprioritaskan pendekatan persuasif. "Personel yang bertugas tidak dibekali senjata api," kata Susatyo dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 25 Agustus 2025. (han,ist/Lut)